

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

% Pencapaian Kinerja = 
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(2) Semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja.

% Pencapaian Kinerja=  $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$  X 100%

Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. Sebagian besar indikator Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yaitu terdapat pada kondisi (1), sedangkan untuk kondisi (2) hanya ada 1 (satu) indikator, yaitu: 1. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Skala Penilaian

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	> 100	Sangat Baik
2.	> 80 – 100	Baik
3.	> 55 – 80	Sedang
4.	< 55	Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Kelautan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Target Renstra 2016
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Misi Pertama: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Perikanan dan Kelautan									
Sasaran 1: Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat									
	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan								
1	Produksi Perikanan Budidaya	%	105	105.39	100.37	105	101.12	96.30	105,00
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	101.58	115.19	113.39	101.58	102.53	100.93	101,58
3	Produksi Olahan	%	110	105.68	96.07	110	125	113.63	110,00
4	Produksi Non Konsumsi	%	102	72.78	71.35	102	224.53	219.60	102,00
	Prosentase Peningkatan Produksi Garam								
5	Produksi Garam	%	78,75	100,18	127,21	105	0,15	0,14	105,00
Sasaran 2: Meningkatkan Peran Jawa Barat sebagai Sentra Benih Nasional									
6 *)	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan mas	%	-	-	-	50,00	302,97	605,93	50
7 *)	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan nila	%	-	-	-	50,00	43,03	86,05	50
8 *)	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan patin	%	-	-	-	10,00	16,18	161,77	10

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Target Renstra 2016
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
9 *)	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan lele	%	-	-	-	10,00	44,70	446,96	10
Sasaran 3: Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									
10	NTP sub sektor perikanan	indeks	111,68	105,19	94,19	105,72	100,46	89,50	105,72
<b>Misi Kedua: Meningkatkan Usaha dan Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan</b>									
Sasaran 1: Meningkatkan Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan									
11	Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	%	86,00	98,90	115,00	88,00	96,72	110,03	88,00
Sasaran 2: Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Dikonsumsi									
12	Ketersediaan ikan untuk di konsumsi	%	102,00	102,2	100,20	102,00	110,00	109,82	102,00
<b>Misi 3: Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan</b>									
Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan dan Pengendalian SDKP									
13	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (IUU fishing)  Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut, PPK, dan	%	15,00	25,00	166,66	20	35,34	176,72	20,00

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Target Renstra 2016
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Perairan Umum								
	Jumlah Kawasan Konservasi					1 Kawasan	1 Kawasan	100	1 Kawasan
	Jumlah Penebaran Benih Ikan Endemik Di Perairan Umum			7.903.400		6.000.000	11.805.000	196,75	6.000.000

# Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

## 3.1.3 Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah barometer ukuran keberhasilan atau pencapaian yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

- a. Mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk penyelenggaraan manajemen yang baik dan benar.
- b. Mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan progresivitas akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
Misi Pertama: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Perikanan dan Kelautan						
Sasaran 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat						
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan						
1.	Produksi Perikanan Budidaya	%	105	101.12	96,30	Baik
2.	Produksi Perikanan Tangkap	%	101,58	102.53	100.93	Sangat Baik
3.	Produksi Olahan	%	110	125	113,63	Sangat Baik
4.	Produksi Non Konsumsi	%	102	224,53	219,60	Sangat Baik
Prosentase Peningkatan Produksi Garam						
5.	Produksi Garam	%	78,75	0,15	0,14	Kurang
Sasaran 2: Meningkatkan Peran Jawa Barat sebagai Sentra Benih Nasional						
6.	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan mas	%	50	302,97	605,93	Sangat Baik
7.	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan nila	%	50	43,03	86,05	Baik
8.	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan patin	%	10	16,18	161,77	Sangat Baik
9	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan lele	%	10	44,70	446,96	Sangat Baik
Sasaran 3: Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan						
10.	NTP sub sektor perikanan	indeks	105,72	99,24	93,87	Baik
Misi Kedua: Meningkatkan Usaha dan Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan						
Sasaran 1: Meningkatkan Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan						
11.	Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	%	88,00	96,72	110,03	Sangat Baik

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
Sasaran 2: Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Dikonsumsi						
12.	Konsumsi ikan	%	102,00	110,00	109,82	Sangat Baik
Misi 3: Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan						
Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan dan Pengendalian SDKP						
13.	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (IUU fishing)	%	20	35,34	176,72	Sangat Baik
	Jumlah Kawasan Konservasi	%	1 Kawasan	1 Kawasan	100	Sangat Baik
	Jumlah Penebaran Ikan Endemik di Perairan Umum	%	6 Juta Ekor	11.805.000	196.75	Sangat Baik

Penjelasan pencapaian masing-masing sasaran di Tahun 2016 adalah sebagai berikut (data terlampir pada lampiran 3) :

**a. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan**

Produksi perikanan budidaya di Jawa Barat Tahun 2016 tercapai sebesar 1.089.732,21 ton. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan produksi pada beberapa cabang usaha budidaya perikanan air tawar maupun laut. Masyarakat juga lebih jeli melakukan usaha polikultur melalui program Ugadi (udang galah dan padi), Pamas (padi dan ikan mas), dan Panila (padi dan ikan nila). Peningkatan minat masyarakat untuk budidaya di KJA serta adanya peningkatan jumlah RTP. Peningkatan produksi perikanan budidaya juga disebabkan adanya bantuan dan pelatihan teknologi budidaya yang dilakukan di beberapa UPTD di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, adanya sosialisasi dan workshop Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), temu koordinasi, dan forum teknologi budidaya, hal ini memotivasi pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produksinya sehingga memberikan efek kenaikan pendapatan.

Produksi perikanan tangkap Tahun 2016 sebesar 291.321,55 ton. Adanya peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, bantuan untuk masyarakat, dan pelatihan teknis perawatan kapal membantu peningkatan produksi perikanan tangkap dapat mempengaruhi produksi perikanan tangkap. Demikian juga dengan bertambahnya hasil penangkapan di perairan umum, karena telah dilakukan penebaran benih ikan pada tahun-tahun sebelumnya.



## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---



Gambar 3.1. Budidaya Perikanan Air Tawar



Gambar 3.2. Kapal Perikanan



Gambar 3.3. Kegiatan Restocking Benih Ikan di Perairan Umum

Produksi olahan (data sementara), Tahun 2016 sebanyak 148.250,00 ton. Masih adanya kekurangan input data atau data dari pengolah yang tidak/belum melaporkan jumlah olahan.



## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.4. Kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Hias

Produksi ikan non konsumsi, khususnya ikan hias, pada Tahun 2016 mencapai 594.385.397 ekor. Pada Tahun 2016 ini masyarakat perikanan yang membudidayakan ikan hias belum sepenuhnya beraktivitas sehingga ikut mempengaruhi produksi ikan hias. Banyak pembudidaya ikan hias yang sementara waktu mengurangi aktivitasnya karena berkurangnya ketersediaan air bersih untuk pembenihan. Berbeda dengan ikan konsumsi, ikan hias memerlukan kondisi lingkungan yang lebih terjaga.

Produksi garam sangat dipengaruhi oleh musim. Sejak awal tahun hingga akhir Tahun 2016 terjadi musim hujan yang dilanjut dengan kemarau basah. Akibatnya di daerah produsen garam hampir tidak dapat memproduksi, atau produksi yang ada sangat jauh dari target yang harus dicapai.



Gambar 3.5. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pelatihan Budidaya Perikanan

b. **Jawa Barat sebagai sentra benih nasional**

Kemampuan produksi benih ikan di Jawa Barat turut memenuhi kebutuhan benih nasional, karena Jawa Barat merupakan sentra pembenihan ikan. Untuk perhitungan indikator ini menunggu data akhir tahun dibandingkan dengan data benih ikan nasional.

c. **Nilai Tukar Petani (NTP)**

Capaian NTP sektor perikanan Jawa Barat Tahun 2016 sebesar 105.19 atau 99% dari target Tahun 2016 yaitu 105,92. Nilai tukar petani subsektor perikanan (NTN), merupakan salah

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani subsektor perikanan. Perhitungan indikator ini berasal dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

### d. **Meningkatnya prosentase jumlah produksi perikanan yang memenuhi sistem jaringan kesehatan**

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pada Tahun 2016 ditunjukkan dengan meningkatnya sampel yang memenuhi standar, terdapat 1162 sampel yang memenuhi standar dari 1200 sampel, atau 96,22%. Indikator ini lebih tinggi daripada yang ditargetkan yaitu 88,00%.



Gambar 3.6. Sarana Pengolahan

### e. **Tingkat Konsumsi Ikan**

Upaya pencapaian target konsumsi ikan di Jawa Barat terus dilakukan secara bertahap, adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di antaranya melalui kegiatan promosi dan sosialisasi “Gemar Makan Ikan” untuk menggalang kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani dari sumber ikan; serta mengupayakan pengadaan bahan pangan ikan melalui peningkatan produksi sendiri dan impor antar provinsi. Perhitungan dilakukan di akhir tahun.

### f. **Penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor perikanan dan kelautan**

Pada Tahun 2016, jumlah kasus pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (*IUU fishing*) terjadi sebanyak 116 kasus. Terjadinya jumlah kasus yang terungkap ini disebabkan adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian SDKP dilaksanakan melalui pengawasan terhadap pulau-pulau kecil di Jawa Barat, juga pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), dan pada Tahun 2016 terdapat 45 POKMASWAS yang telah dibina.

### 3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 terhadap sasaran strategis pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Barat pada Tahun 2016 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 3.4  
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Misi Pertama	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
Sasaran 1	<b>Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat.</b> Dalam prosentase peningkatan produksi perikanan termasuk kategori “Baik” yaitu produksi perikanan budidaya dengan nilai 96,30 baik; perikanan tangkap 100.93 termasuk Sangat Baik; produksi olahan termasuk kategori Sangat Baik dengan nilai 125; dan produksi garam dgn nilai kurang 0,14. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program: 1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya (APBD) 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (APBN/DK) 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (APBN/TP) 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD) 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN/DK) 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN/TP) 7. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (APBN/DK) 8. Program Pengelolaan Ruang Laut (APBN/DK)
Sasaran 2	<b>Meningkatkan Peran Jawa Barat sebagai Sentra Benih Nasional.</b>  Prosentase ini didapat dari program: 1.Program Pengembangan Perikanan Budidaya (APBD)
Sasaran 3	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.</b> Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perikanan mendapatkan nilai capaian sebesar 93,87 dengan kategori ”Baik”. Hal ini dilaksanakan melalui program: 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD) 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN/DK)
Misi Kedua	Meningkatkan Usaha dan Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan
Sasaran 1	<b>Meningkatkan Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan.</b> Prosentase jumlah produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan diperoleh capaian kinerja sebesar 96,83 dengan kategori “Baik”. Indikator ini diperoleh dengan program: 1. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (APBN/DK)
Sasaran 2	<b>Meningkatkan Konsumsi Ikan.</b> Indikator konsumsi ikan perkapita pertahun diperoleh capaian kinerja sebesar 110 dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dengan program: 1.Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD)

# Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Misi Ketiga	Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
Sasaran 1	<p>Meningkatkan Pengelolaan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan dan Pengendalian SDKP. Indikator kinerja dari sasaran ini, yaitu Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (<i>IUU fishing</i>) dengan pencapaian sebesar 142,24 dengan kategori “Sangat Baik”. Program indikator ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD)</li> <li>2. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBN/DK)</li> </ol>

Tabel 3.5  
 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan  
 Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Capaian Kinerja (%)
<b>Misi Pertama: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Perikanan dan Kelautan</b>					
Sasaran 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat					
1	Produksi Perikanan Budidaya	%	105,39	101.24	4,15
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	115,19	100.93	14,22
3	Produksi Olahan	%	105,68	125	19,32
4	Produksi Non Konsumsi	%	72,78	224,53	151,75
5	Produksi Garam	%	100,18	0,14	-99,85
Sasaran 2: Meningkatkan Peran Jawa Barat sebagai Sentra Benih Nasional					
6	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan mas	%	-	302,97	
7	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan nila	%	-	43,03	
8	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan patin	%	-	16,18	
9	Prosentase kontribusi pemenuhan benih ikan lele	%	-	44,70	
Sasaran 3: Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
10.	NTP sub sektor perikanan	indeks	94,88	99,24	4,36
<b>Misi Kedua: Meningkatkan Usaha dan Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan</b>					
Sasaran 1: Meningkatkan Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan					
11.	Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	%	98,89	96,72	-2,17
Sasaran 2: Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Dikonsumsi					
12.	Prosentase peningkatan konsumsi ikan	%	102,2	110,00	7,8

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Misi 3: Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan					
Sasaran 1: Meningkatkan Pengelolaan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan dan Pengendalian SDKP					
13.	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor perikanan dan kelautan ( <i>IUU fishing</i> )	%	166,66	176.72	10.06
	Jumlah Kawasan Konservasi			1 Kawasan	
	Jumlah Penebaran Benih Ikan Endemik Di Perairan Lokal		7.903.400	11.805.000	

### 3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 bersumber dari dana APBD, APBN Dekonsentrasi dan APBN Tugas Pembantuan. Program dan kegiatan tersebut menunjang dalam pencapaian target indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

#### I. Program Pengembangan Ketahanan Pangan (APBD)

Program Pengembangan Ketahanan Pangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.047.832.100,00 yang terealisasi sebesar Rp 885.132.399,00 atau sebesar 84,47%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 89,95%. Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya; 2. Prosentase peningkatan produksi non konsumsi; dan 3. Prosentase permintaan benih ikan.

#### II. Program Pengembangan Budidaya Perikanan (APBD)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 27.711.934.245,00 yang terealisasi sebesar Rp 27.239.540.654,00 atau sebesar 98,30%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 99.98 %. Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya; 2. Prosentase peningkatan produksi non konsumsi; dan 3. Prosentase pemenuhan kebutuhan benih ikan.

#### III. Program Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 12.109.727.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 11.047.989.424,00 atau sebesar 91,23%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 97,01%.

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap; 2. Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (*illegal fishing*); dan 3. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perikanan.

### **IV. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD)**

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp3.436.893.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 3.160.386.488,00 atau sebesar 91,95%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%.

Indikator kinerja program ini, antara lain ketersediaan ikan untuk dikonsumsi.

### **V. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN/DK)**

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 1.517.224.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.514.976.230,00 atau sebesar 99,85%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%. Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap; dan 2. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perikanan.

### **VI. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (APBN/DK)**

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 3.720.517.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 3.658.676.601,00 atau sebesar 98,34%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%. Indikator kinerja program ini yaitu Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya.

### **VII. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (APBN/DK)**

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 662.400.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 662.054.500,00 atau sebesar 99,95%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%. Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor perikanan dan kelautan (*IUU fishing*).

### **VIII. Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan (APBN/DK)**

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 1.971.591.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.863.709.350,00 atau sebesar 94,53%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%.



## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi olahan; 2. Prosentase jumlah produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan.

### IX. Program Pengelolaan Ruang Laut (APBN/DK)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 1.700.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.441.865.000,00 atau sebesar 84,82%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai yaitu 98,53%. Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi garam.

### X. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN/TP)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 1.200.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.159.152.500,00 atau sebesar 96,60%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%.

Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

### XI. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (APBN/TP)

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 2.493.500.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 2.421.608.000,00 atau sebesar 97,12%. Untuk realisasi fisik program ini mendapatkan nilai, yaitu 100%.

Indikator kinerja program ini, antara lain 1. Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya.

### Permasalahan pada Misi Pertama

Misi pertama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Perikanan dan Kelautan”. Tetapi sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.), nelayan menjadi terbatas dalam menangkap hewan tersebut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam menangkap Lobster, Kepiting dan Rajungan tidak boleh menangkap yang sedang bertelur dan tidak boleh yang berukuran masih kecil. Untuk Lobster hanya boleh menangkap dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter) atau setara 300 gram, Kepiting dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter) atau setara 350-450 gram dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter) atau setara 55-80 gram.



## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

Padahal Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat mempunyai UPTD yang bergerak dalam bidang budidaya tambak dimana memerlukan benih-benih ikan tambak untuk dibudidayakan sampai ukuran dewasa dan siap untuk dikonsumsi.

Maka dari itu dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi friksi dengan Misi Pertama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat itu sendiri karena akan mengurangi produktivitas perikanan dan kelautan.

Kemudian adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menyebabkan anjloknya hasil tangkapan laut para nelayan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa alat tangkap Pukat Hela yang terdiri dari Pukat Hela Dasar (*Bottom Trawls*), Pukat Hela Pertengahan (*Midwater Trawls*), Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trals*) dan Pukat Dorong dilarang untuk digunakan para nelayan juga Pukat Tarik yang terdiri dari Pukat Tarik Pantai (*Beach Seines*) dan Pukat Tarik Berkapal (*Boat or Vessel Seines*) sama halnya dilarang dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Waduk Cirata yang juga mengurangi produktivitas perikanan budidaya, khususnya dengan media Kolam Jaring Apung (KJA). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat pembatasan jumlah KJA di Waduk Cirata yang pada saat data terakhir yang dimiliki Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 52.000 petak. Saat ini produksi KJA (Ikan Nila, Ikan Mas dan Ikan Patin), yaitu sebesar 198.743.90 ton dan produksi penangkapan sebanyak 552 ton.

### Permasalahan pada Misi Kedua

Misi Kedua Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, yaitu “Meningkatkan Usaha dan Nilai Tambah Produk Perikanan dan Kelautan”. Permasalahan yang dialami adalah kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengujian mutu hasil perikanan. Seperti kita ketahui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat mempunyai UPTD yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pengujian mutu hasil perikanan melalui laboratorium yang untuk melakukan hal tersebut sehingga diperlukan SDM yang cukup mumpuni atau berkompeten sehingga Misi Kedua ini masing menjadi permasalahan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.

### Permasalahan pada Misi Ketiga

Seperti diketahui Misi Ketiga Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yaitu “Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan”. Hal yang masih menjadi masalah adalah kurangnya jumlah KELOMPOK PENGAWAS MASYARAKAT (POKMASWAS) yang bertugas untuk mengawasi pulau-pulau terawasi, seperti di Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian),

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

Kabupaten Tasikmalaya (Pulau Nusa Manuk) dan 3 (tiga) pulau di Kabupaten Sukabumi. Saat ini jumlah POKMASWAS yang terbina terdapat pada 10 kabupaten/kota untuk Tahun 2015 dengan target 71 POKMASWAS dan hal ini masih dirasa kurang untuk Provinsi Jawa Barat.

### 3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan penguatan terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pengelolaan potensi sumberdaya perikanan budidaya di Jawa Barat yang berdaya guna dan berhasil guna secara *sustainable*, memberikan penguatan terhadap kemandirian masyarakat pembudidaya dalam melakukan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan dan kelautan di Jawa Barat secara terintegrasi.

#### 2) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan yang diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan luar negeri hasil perikanan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk perikanan non konsumsi, peningkatan produk olahan hasil perikanan, pengembangan sistem usaha perikanan pembinaan dan pengembangan sistem usaha peningkatan mutu dan penambahan nilai produk hasil perikanan, peningkatan pemanfaatan pengolahan ikan dan investasi perikanan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan kelautan, yang berdaya saing dan berbasis IPTEK.

#### 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan penguatan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengelolaan potensi sumberdaya perikanan tangkap di Jawa Barat yang berdaya guna dan berhasil guna menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, memberikan penguatan terhadap kemandirian nelayan dan masyarakat pesisir dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya dukung dan daya tampung sumberdaya perikanan dan kelautan.

#### 4) Program Peningkatkan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang sehat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

### a. Tematik Sektoral

Suksesnya pembangunan perikanan dan kelautan pada umumnya tidak lepas dari keadaan sumberdaya manusia sebagai faktor produksi sekaligus pasar yang potensial. Sebagai faktor produksi, maka jumlah penduduk, tingkat pengetahuan, serta kemampuannya akan sangat mempengaruhi gerak laju pembangunan. Sedangkan sebagai pasar potensial, maka jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup besar, bahkan terbanyak di Indonesia, dan dengan laju pertumbuhan yang setiap tahunnya cukup pesat, kiranya dari satu segi akan merupakan potensial pasar (konsumen ikan) yang cukup besar, namun dari segi kemampuan daya beli dan kesadaran akan arti pentingnya ikan sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi masih cukup rendah, sehingga daya serap pasar akan produk perikanan oleh konsumen lokal/regional juga masih cukup rendah.

Sebagaimana yang digariskan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat menyusun terobosan-terobosan baru dalam perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan yang didasarkan pada kegiatan Tematik sektoral berdasarkan *Common Goals* (CG 4. Meningkatkan Ekonomi Pertanian) yang terfokus pada:

1. Pengembangan Agribisnis *forest business*, *marine business* dan agroindustri
  - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
  - c. Peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai
  - d. Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan
  - e. Peningkatan teknologi penangkapan ikan dan kelautan
  - f. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  - g. Pelayanan pengujian mutu hasil perikanan
2. Jawa Barat sebagai sentra produksi benih nasional
  - a. Peningkatan produksi perikanan budidaya
  - b. Peningkatan produksi induk dan benih ikan nila dan mas
  - c. Pengembangan teknologi budidaya perikanan air tawar (patin dan lele)
  - d. Peningkatan produksi budidaya perikanan air tawar (gurame)
  - e. Peningkatan restocking di perairan umum dan pengembangan ikan hias
  - f. Revitalisasi budidaya tambak pantai utara berwawasan lingkungan (GAPURA UTARA)
  - g. Revitalisasi budidaya perikanan pantai selatan (GAPURA SELATAN)

### b. Tematik Kewilayahan

Rencana program dan kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap wilayah

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

---

Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat. Kegiatan tematik kewilayahan yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan meliputi 4 (empat) WKPP.

### 1. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP I Bogor

- a. Pusat budidaya ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan global, dengan ruang lingkup: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas agribisnis hulu hilir di bidang perikanan budidaya air tawar dan ikan hias, meliputi: peningkatan teknologi budidaya, pembenihan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan industri agro input budidaya perikanan.
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Palabuhanratu, dengan ruang lingkup: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian berbasis agribisnis, serta bisnis kelautan di kawasan Palabuhanratu dan sekitarnya, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal serta memacu keterlibatan perekonomian masyarakat sekitar.

### 2. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP II Purwakarta

Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau, dengan ruang lingkup kegiatan: revitalisasi usaha budidaya ikan berwawasan lingkungan (*bio security*), meliputi penataan areal budidaya terpadu tambak-mangrove (*silvo fisheries*), peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas unggulan, pengendalian hama penyakit ikan, pengolahan dan pemasaran, fasilitasi dukungan sarana dan prasarana, fasilitasi kelembagaan dan pembiayaan.

### 3. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP III Cirebon

- a. Industrialisasi perikanan dengan penerapan prinsip *blue economy*, dengan ruang lingkup kegiatan mendorong peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk yang berdaya saing tinggi berorientasi pasar, melalui peningkatan kemampuan teknologi, perbaikan mutu, keamanan pangan, adanya jaminan pasar serta kepastian beli, dan dukungan modal usaha. Industrialisasi perikanan memerlukan sinergi industri perikanan dari hulu sampai hilir agar bersama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Penyediaan infrastruktur yang memadai antara hulu dan hilir, regulasi pemerintah yang tegas dan jaminan keamanan berusaha, serta penyediaan sarana dan prasarana (*cold storage*).
- b. Pengembangan industri makanan olahan skala industri dan UMKM melalui modernisasi sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, regulasi pemerintah yang tegas sebagai upaya peningkatan investasi dan penguatan modal, serta peningkatan kemampuan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam penerapan inovasi teknologi dapat mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional.

### 4. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP IV Priangan

## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

- a. Pengembangan budidaya ikan air tawar, dengan ruang lingkup mendorong tumbuh kembangnya siklus agribisnis hulu hilir untuk mendukung terwujudnya swasembada protein.
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran, dengan ruang lingkup kegiatan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian di kawasan Pangandaran dan sekitarnya, dengan fokus pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta pengembangan aktifitas penunjang kepariwisataan (agribisnis dan bisnis kelautan).

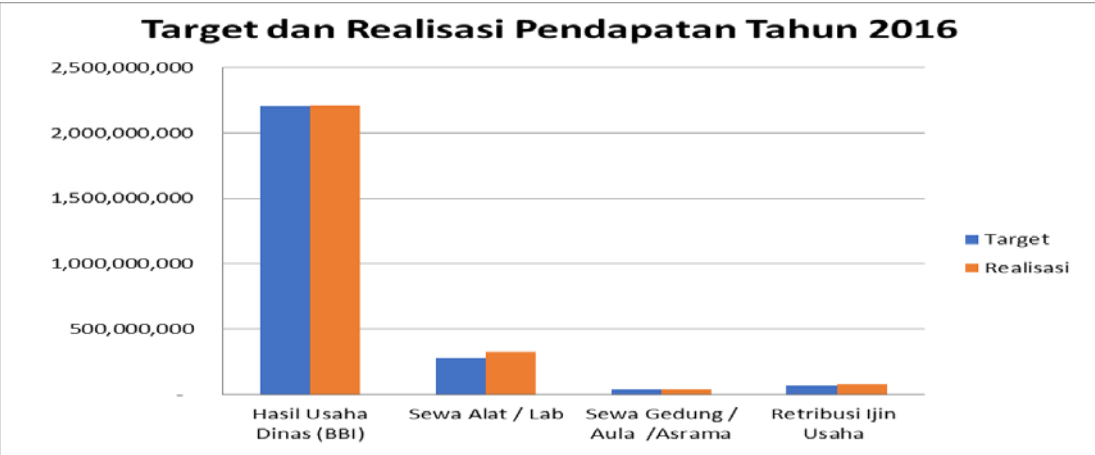
### 3.2 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung pembangunan Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 102.34% dari target pendapatan. Rincian pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Pencapaian Target Pendapatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

No.	Uraian	Target Murni (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	%
1.	Hasil Usaha Dinas (BBI) Tambak Dinas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.206.000.000,00	2.213.940.000,00	100.36
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) berdasarkan Perda 14 Tahun 2011 (Sewa Alat/Lab)	280.000.000,00	321.688.500,00	114.89
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) berdasarkan Perda 14 Tahun 2011 (Sewa Gedung/Aula/Asrama)	36.000.000,00	36.000.000,00	100
4.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	65.000.000,00	75.951.750,00	116.85
Jumlah Pendapatan		2.587.000.000,00	2.647.580.250,00	102.34

Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut :



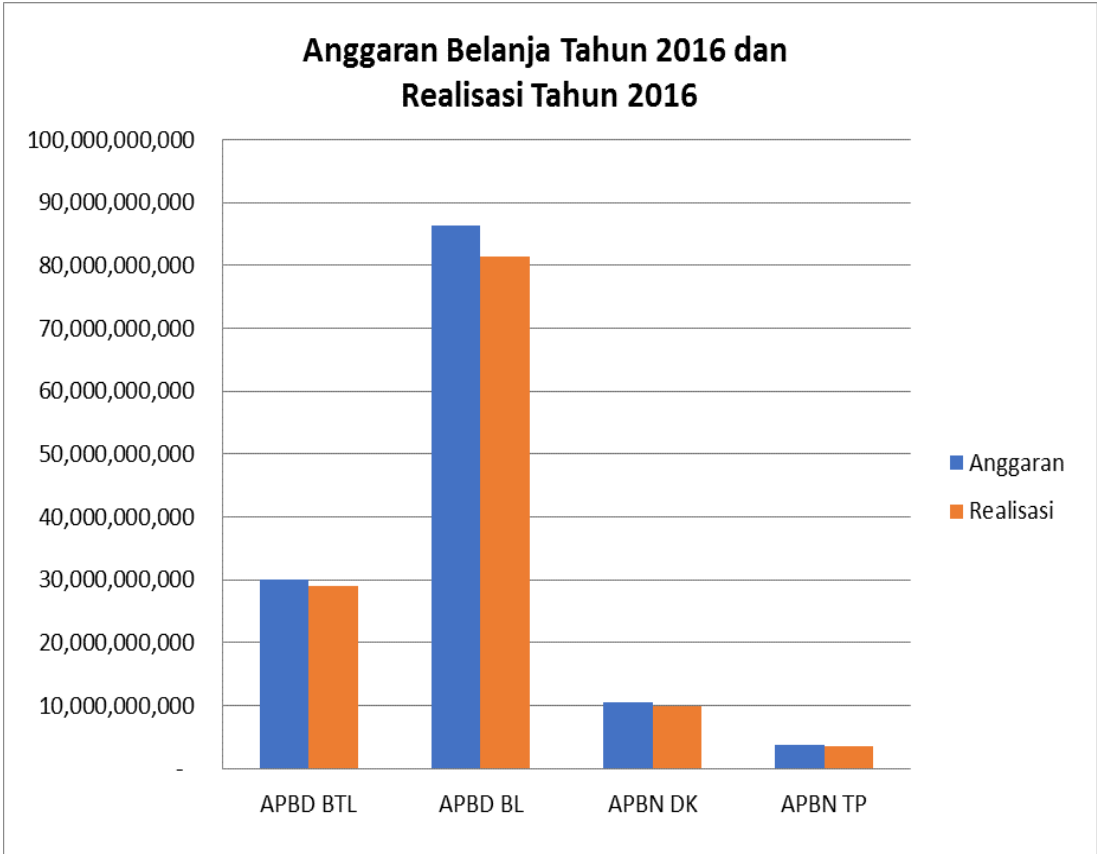
Gambar 3.7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Tahun 2016

# Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

## 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dengan berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Anggaran yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat berasal dari APBD dan APBN.

Gambaran penyerapan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.8. Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2016

### a. APBD

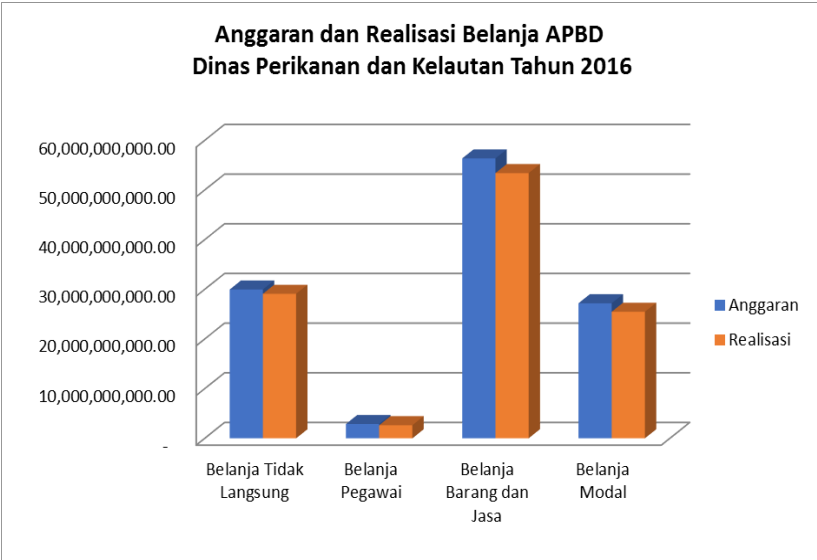
Dalam Tahun Anggaran 2016, Belanja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dianggarkan sebesar Rp 116.372.847.606,00, pada Tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar Rp 110.586.668.908 atau 95.03%. Belanja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp 29.958.823.906,00 dan pada dapat direalisasikan sebesar Rp 29.084.854.694,00 atau 97,08%, sedangkan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp 86.414.023.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 81.051.814.214,00 atau 94.32%. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi Belanja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

# Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.7  
Realisasi Belanja Dinas Perikanan dan Kelautan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No.	Belanja Dinas	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016	%
BELANJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT				
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.958.823.906,00	29.084.854.694,00	94.32
	a. Belanja Pegawai	29.958.823.906,00	29.084.854.694,00	94.32
	b. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
	g. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA LANGSUNG	86.414.023.700,00	81.501.814.214,00	94.32
	a. Belanja Pegawai	2.878.425.000,00	1.894.455.000,00	65,82
	b. Belanja Barang dan Jasa	56.350.186.845,00	38.515.745.801,00	68,35
	c. Belanja Modal	27.185.411.855,00	13.500.516.405,00	49,66

Gambaran perbandingan antara anggaran APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan realisasi belanja Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.9. Anggaran APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2016

b. APBN

Program dan kegiatan yang difasilitasi atau bersumber dari dana APBN, baik Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan (TP), lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdiri dari 8 program, antara lain untuk Dekonsentrasi sebanyak 6 (enam) program dan untuk TP sebanyak 2 (dua) program. Jumlah anggaran program dan kegiatan APBN Dekonsentrasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebesar Rp 10.491.732.000,00 dan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp 3.693.500.000,00. Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi, yakni sebesar Rp



## Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

10.491.732.000,00 atau 94,53%, sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah sebesar 99.52%. Indikator dari APBN Tugas Perbantuan realisasi anggarannya sebesar Rp 3.580.760.500,00 atau 96.95%, sedangkan realisasi fisiknya adalah sebesar 100%.

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Dekonsentrasi**  
**Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-01)	920.000.000,00	867.825.300,00	94.33	97.30
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-03)	1.517.224.000,00	1.514.976.230,00	99.85	100
3.	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-04)	3.720.517.000,00	3.658.676.601,00	98.34	100
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-05)	662.400.000,00	609.624.500,00	92,03	100
5.	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-06)	1.971.591.000,00	1.863.709.350,00	94.53	100
6.	Pengelolaan Ruang Laut (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat-07)	1.700.000.000,00	1.441.865.000,00	84.82	98.53
Jumlah		10.491.732.000,00	10.009.106.981,00	95.40	99.52

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp 10.009.106.981,00 (95.40%) dengan sisa anggaran sebesar Rp (4.60%). Realisasi dana TP dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini:

# Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.9  
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Program  
Dana Tugas Pembantuan Dinas Perikanan dan Kelautan  
Provinsi Jawa Barat sampai Tahun 2016

No.	Program	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Keuangan Tahun 2016 (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan – 03)	1.200.000.000,00	1.159.152.500,00	96,60	100
2.	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat - 04)	2.493.500.000,00	2.421.608.000,00	97.12	100
Jumlah		3.693.500.000,00	3.580.760.500,00	96.95	100

Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa dari anggaran Rp 3.693.500.000,00 pada Tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.580.760.500,00 (96.95%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 112.739.500,00 (3.05%).